

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya negara-negara berkembang merupakan negara yang baru merdeka setelah perang Dunia kedua. Meskipun negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan cukup baik tetapi hanya sedikit yang dapat mengatasi kemiskinan pada sebagian besar penduduknya. Negara berkembang adalah negara yang sedang membangun menuju negara modern atau maju. Di dalamnya terdapat suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan negara atau wilayah dalam proses pembangunan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh berbagai negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Cara-cara tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar yakni kebijakan-kebijakan yang mengandalkan pasar bebas untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan, dan pendekatan-pendekatan yang lebih mengandalkan intervensi negara dan perencanaan pusat (Rahmat, 2021). Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut akan terdapat banyak hambatan yang ditemui. Hal tersebut yang menjadikan suatu negara berkembang justru semakin menunjukkan penurunan angka statistik negaranya dalam berbagai aspek hingga upaya dalam memajukan negaranya gagal. Untuk melihat hal itu terdapat tiga kategori kegagalan suatu negara yakni *Failed States*, *Weak States* dan *Collapsed States*.

Negara berkembang adalah negara yang sedang membangun menuju negara modern atau maju, hal itu lah yang dilakukan oleh Sri Lanka. Sri Lanka melakukan upaya guna membuat negara nya menjadi berkembang hingga menjadi negara maju dengan berbagai cara. Sri Lanka adalah negara yang berada di posisi strategis di dekat jalur laut maritim utama yang melintasi Samudra Hindia dan menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika. Sri Lanka meraih kemerdekaan pada tahun 1948 dengan harapan tinggi untuk pencapaian ekonomi. Negara ini memiliki banyak keuntungan awal yang tidak dimiliki oleh sebagian besar negara Asia lainnya seperti lokasi yang strategis di Samudra Hindia, ekonomi terbuka dengan sektor ekspor yang dinamis, standar pendidikan yang relatif baik, infrastruktur fisik yang berkembang dengan baik, dan aparatur administratif efisien yang sebagian besar dikelola oleh penduduk setempat. Posisi neraca pembayarannya baik yang didukung oleh cadangan devisa yang besar dan posisi anggaran yang sehat. Hal ini adalah sebuah bentuk stabilitas, kedamaian dan ketertiban, yang

berlawanan dengan bencana kontemporer di daerah-daerah jajahan Inggris lainnya di wilayah ini. Sri Lanka adalah model negara persemakmuran Inggris, yang dipersiapkan dengan cermat untuk kemerdekaan. Kondisi awal ini membenarkan harapan bahwa Sri Lanka akan membuktikan negara terbaik di antara semua negara pasca penjajahan di Asia lainnya (John R. Karlik, 2020).

Pada tahun 1950-an, Sri Lanka menempati peringkat sebagai salah satu negara Asia yang paling makmur, dengan pendapatan per kapita dan indikator pembangunan lainnya yang menempatkannya jauh di atas negara-negara tetangganya di Asia Selatan, dan bahkan jauh di atas negara-negara seperti Thailand, Korea Selatan, dan Taiwan di Asia Timur. Standar hidup Sri Lanka dapat dikategorikan cukup baik seperti melek huruf orang dewasa, angka harapan hidup, angka kematian bayi masih jauh di atas negara-negara berkembang lainnya. Sebagai negara pengekspor teh terbesar kedua di dunia, pertanian menjadi komoditas ekspor utama Sri Lanka. Sri Lanka menyumbang 71% dari produksi kelapa dunia dan 36% dari produksi karet dunia. Selain pertanian, pertambangan menjadi bagian penting dari ekonomi Sri Lanka, memproduksi grafit dan timbal hitam, yang sebagian besar diekspor ke Jepang. Sri Lanka juga sangat menarik bagi investor asing karena potensi ekonominya yang besar dalam bidang pariwisata, pertanian, dan infrastruktur (Administration, 2024).

Awal kebangkrutan Sri Lanka dimulai pada tahun 2013, ketika Sri Lanka mendapatkan alokasi tambahan dari China senilai 272 juta dolar AS yang akan digunakan untuk proyek pembangunan jalur kereta api. Investasi ini juga termasuk pembangunan Pelabuhan Hambantota, yang berakhir gagal. Pada 1 April 2022, Presiden Rajapaksa mengumumkan sebuah keadaan darurat sementara. Dalam beberapa bulan selanjutnya, situasi di Sri Lanka semakin memburuk. Pada tanggal 5 Juli 2022, Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, mengumumkan bahwa negaranya telah bangkrut, dan dia memperkirakan bahwa krisis inflasi yang melanda Sri Lanka akan berlanjut hingga akhir tahun 2023. Kondisi ini telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. (Athukoorala, *The Sri Lankan economy: Hope, despair and prospects*, 2023)

Upaya yang dilakukan Sri Lanka untuk memajukan negaranya tidak berujung kepada perkembangan atau kemajuan negaranya. Deskripsi tentang upaya Sri Lanka untuk memajukan negaranya justru berakhir dengan kegagalan hingga menyebabkan krisis. Sejak akhir tahun 1960-an Sri Lanka mulai mengalami penurunan, bahkan pencapaian kebutuhan dasar yang dibanggakan menjadi relatif kurang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Dengan kegagalan menemukan cara untuk membuat ekonomi tumbuh cukup cepat untuk mempertahankan kemajuan sosial, Sri Lanka telah menjadi ilustrasi yang jelas tentang

keterbatasan pendekatan langsung terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi. Pada akhirnya, negara ini mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mencapai puncaknya pada tahun 2022.

Hal tersebut membuat Sri Lanka masuk dalam daftar negara gagal, jika dilihat dari indikator negara gagal Sri Lanka dapat dikategorikan dalam status *Failed States*. Dikutip dari *Institute of Peace and Conflict Studies* yang menyatakan bahwa Sri Lanka berada pada posisi ke-9 dalam *Failed State Index* (FSI), penurunan ini disebabkan oleh kinerja buruk Sri Lanka dalam tujuh kategori yakni keluhan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, kemunduran ekonomi, delegitimasi negara dalam hak asasi manusia, elit yang terfragmentasi, dan intervensi eksternal (Ariyathilaka, 2019). Selain itu pemimpin agama budha yakni Senior monk Medagama Dhammananda juga mengatakan bahwa Sri Lanka kini menjadi negara *failed states*. Dhammananda mengatakan dia dan rekan-rekan pemimpin Budha telah bersama-sama mengajukan petisi kepada Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk membentuk pemerintahan sementara untuk menarik negara keluar dari krisis ini (Jazeera, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Sri Lanka menjadi negara gagal/*Failed state*?

1.3 Kerangka Teori

Negara atau bangsa ada untuk menyediakan metode desentralisasi dalam menyediakan barang-barang atau kebutuhan publik kepada orang-orang yang tinggal di dalam parameter yang ditentukan atau yang disebut perbatasan. Setelah menggantikan raja-raja di masa lalu, negara-negara modern berfokus dan menjawab keprihatinan dan tuntutan masyarakat. Mereka mengatur dan menyalurkan kepentingan rakyatnya, tetapi kenyataannya hal tersebut sering kali terjadi tidak secara eksklusif untuk memajukan tujuan dan nilai-nilai nasional negara mereka. Mereka menyangga atau memanipulasi kekuatan dan pengaruh eksternal, memperjuangkan keprihatinan lokal atau khusus dari para penganutnya, dan menjadi penengah antara kendala dan tantangan dari arena internasional dan dinamika realitas ekonomi, politik, dan sosial antar negara mereka sendiri. Negara-negara berhasil atau gagal dapat dilihat dari beberapa hal tersebut. Berdasarkan kinerja mereka sesuai dengan tingkat efektivitas mereka dalam menyediakan barang-barang politik yang paling penting, negara yang kuat dapat dibedakan dari *Weak State*, dan *Failed state* dapat dibedakan dari *Collapsed State*.

Dalam kategori negara gagal Robert I Rotberg mengelompokan pada 3 kategori yakni *Failed States*, *Weak State*, dan *Collapsed State*. *Failed States* adalah negara yang tegang, penuh konflik, berbahaya, dan diperebutkan dengan sengit oleh pihak-pihak yang bertikai. Pengadilan merupakan turunan dari Lembaga eksekutif bukannya berdiri secara independen sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada sistem pengadilan untuk mendapatkan keadilan atau ganti rugi terutama terhadap negara. Negara-negara yang gagal juga ditandai dengan memburuknya atau hancurnya infrastruktur. Semakin banyak lubang atau jalan utama yang berubah menjadi jalur rusak. (Rotberg, 2004)

Weak state umumnya digunakan untuk mendefinisikan sebuah negara yang lemah dalam fungsi-fungsi intinya dalam menyediakan keamanan bagi warganya (kesenjangan keamanan), menyediakan layanan dasar bagi warganya (kesenjangan kapasitas), dan memiliki legitimasi di antara rakyatnya (kesenjangan legitimasi). *Weak State* memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan dan institusi pemerintahan yang lemah yang tidak mampu mengimplementasikan kebijakan atau mempertahankan otonomi karena korupsi atau konflik. *Weak State* adalah negara yang tidak memiliki kapasitas dan/atau kemauan untuk mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, untuk membangun dan memelihara lembaga-lembaga politik yang sah, transparan, dan akuntabel, serta untuk mengamankan penduduknya dari konflik kekerasan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya (Patrick, 2008). *Weak State* biasanya memiliki pemerintahan yang memadai untuk bekerja sama dengan organisasi internasional, meskipun korupsi dan logistik dapat membatasi efisiensi penyaluran bantuan (Citizendum, 2018).

Collapsed state adalah versi yang langka dan ekstrem dari failed state. *Collapsed state* menunjukkan kekosongan otoritas. Ini adalah ekspresi geografis belaka dari sebuah lubang hitam di mana pemerintahan yang gagal telah jatuh hingga menyebabkan negara collapse. Ketika keruntuhan itu terjadi, aktor-aktor sub-negara mengambil alih seperti yang selalu terjadi ketika pemerintahan utama menghilang. Para panglima perang atau aktor sub-negara memperoleh kendali atas wilayah dan sub-wilayah dalam negara-bangsa, serta membangun aparat dan mekanisme keamanan mereka sendiri, memberikan sanksi terhadap pasar dan pengaturan perdagangan, dan bahkan membuat bentuk interaksi hubungan internasional yang dilemahkan. Di mana pun terjadi *failure or collapse states*, beberapa pihak telah merekayasa pergeseran dari kekuatan ke kelemahan, dan dengan sengaja memimpin pergeseran sumber daya yang mendalam dan mengacaukan dari negara ke segelintir orang yang berkuasa. Ketika peralihan sumber daya tersebut dipercepat, dan pelanggaran hak asasi manusia meningkat, kekerasan balasan menandakan sejauh mana negara-negara yang bersangkutan telah melanggar

kontrak sosial yang mendasar dan menjadi wadah kosong bagi hak-hak istimewa personalis, kekuasaan pribadi, dan kemiskinan nasional (Rotberg, 2004).

Suatu negara dapat dilihat melalui beberapa indikator yang menyebabkan negara tersebut masuk dalam status *Failed State*. Ditandai dengan permusuhan etnis, agama, bahasa, atau permusuhan antar-komunitas lainnya. Hal tersebut terjadi ketika keserakahan diperbesar oleh mimpi-mimpi tentang penjarahan dari penemuan sumber-sumber kekayaan sumber daya yang baru, yang diperebutkan, seperti ladang minyak bumi, ladang intan, mineral lain, atau kayu. Kegagalan negara tidak dapat dianggap sebagai ketidakmampuan untuk membangun sebuah negara dari kumpulan kelompok-kelompok dengan latar belakang yang beragam, oleh karena itu perlu indikator lainnya untuk mengkategorikan negara tersebut menjadi negara gagal.

Warga negara bergantung pada negara bagian dan pemerintah pusat untuk mengamankan mereka dan membebaskan mereka dari rasa takut. Karena tidak mampu menciptakan suasana keamanan di seluruh negeri, dan sering kali berjuang untuk memproyeksikan kekuasaan dan otoritas resmi mereka sendiri, kegagalan negara yang goyah menjadi jelas bahkan sebelum, atau ketika, kelompok pemberontak mengancam penduduk di pusat-pusat kota dan membuat kontingen pemerintah yang berkuasai kewalahan, seperti yang terjadi di Liberia dan Sierra Leone. Di sebagian besar negara gagal, rezim memangsa konstituen mereka sendiri. Didorong oleh permusuhan etnis atau permusuhan antar-komunal lainnya, atau oleh rasa tidak aman elit yang memerintah, mereka mengorbankan warga negara mereka sendiri atau sebagian dari keseluruhan yang dianggap sebagai musuh (Rotberg, 2004).

Indikator lain dari kegagalan negara adalah meningkatnya kekerasan kriminal. Ketika otoritas negara melemah dan gagal, dan ketika negara menjadi kriminal dalam penindasannya terhadap warganya, maka pelanggaran hukum menjadi lebih nyata. Kelompok kriminal mengambil alih jalan-jalan di kota-kota. Perdagangan senjata dan narkoba menjadi lebih umum. Pasukan polisi biasa menjadi lumpuh. Perilaku anomali menjadi norma. Untuk mendapatkan perlindungan, warga negara perlahan berpaling kepada panglima perang dan tokoh-tokoh kuat lainnya yang mengekspresikan atau mengaktifkan solidaritas etnis atau klan, sehingga menawarkan kemungkinan keamanan di saat semua hal lain, dan negara itu sendiri, runtuh. Tingginya tingkat kejahatan di perkotaan dan munculnya sindikat kriminal menunjukkan adanya anarki dan keputusasaan.

Negara yang gagal ditandai dengan infrastruktur yang rusak atau hancur. Secara metaforis, semakin banyak lubang atau jalan utama yang berubah menjadi jalan berlubang, maka negara tersebut semakin menunjukkan kegagalan. Ketika para penguasa menyedot dana dari kas negara, maka semakin sedikit sumber daya modal untuk pekerja, peralatan, dan bahan baku.

Yang lebih merupakan metafora dari kenyataan sehari-hari adalah indeks koneksi yang gagal, panggilan yang berulang-ulang, dan menunggu tanpa henti untuk perbaikan dan layanan.

Indikator lainnya Ketika sebuah negara telah gagal atau sedang dalam proses menuju kegagalan, sistem pendidikan dan kesehatan yang efektif di jual kepada pihak swasta yang berujung pada hasil sekolah-sekolah yang tidak jelas dan klinik-klinik kesehatan yang meragukan di kota-kot), atau fasilitas-fasilitas umum menjadi semakin rusak dan terabaikan. Guru, dokter, perawat, dan pesuruh dibayar terlambat atau tidak dibayar sama sekali, dan tingkat ketidakhadiran meningkat. Buku-buku pelajaran dan obat-obatan menjadi langka. Warga negara, terutama warga pedesaan, pelajar, dan pasien, perlahan-lahan menyadari bahwa negara telah meninggalkan mereka. Terkadang di mana sebuah negara gagal terpecah, layanan-layanan penting dapat diberikan kepada separuh penduduk yang mendukung, tetapi tidak kepada separuh penduduk yang memberontak dan terlibat dalam perang. Akibatnya angka melek huruf turun, angka kematian bayi meningkat, angka harapan hidup anjlok, dan warga negara yang sudah miskin dan terpuruk menjadi semakin miskin dan tidak berdaya (Rotberg, 2004).

Negara-negara yang gagal menawarkan peluang ekonomi yang tak tertandingi-tetapi hanya untuk segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Mereka yang berada di sekitar penguasa atau oligarki yang berkuasa menjadi semakin kaya sementara saudara-saudara mereka yang kurang beruntung kelaparan. Hak-hak istimewa untuk menghasilkan uang ketika segala sesuatu yang lain memburuk diberikan kepada klien-klien elit yang berkuasa atau pengusaha-pengusaha eksternal yang disukai. Tanggung jawab negara-bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kemakmuran perorangan semua warganya secara nyata tidak ada.

Sebuah indikator kegagalan, namun bukan penyebab kegagalan, adalah menurunnya tingkat PDB tahunan nasional dan per kapita. Dasar-dasar statistik sebagian besar negara di negara berkembang goyah, tetapi di negara gagal atau negara gagal dengan sumber daya alam yang besar, menunjukkan angka PDB yang secara keseluruhan memburuk, tingkat pertumbuhan yang tipis dari tahun ke tahun, dan kesenjangan yang lebih besar antara seperlima penduduk terkaya dan termiskin. Inflasi biasanya melonjak karena para penguasa menyerbu bank sentral dan mencetak uang. Ketidakamanan ekonomi yang dihasilkan, yang sering direayasa oleh penguasa untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri dan kekuatan politik dan ekonomi mereka sendiri. Namun mereka tidak perlu gagal dalam semua indikator tersebut untuk gagal secara keseluruhan, terutama karena pemenuhan kebutuhan keamanan memiliki bobot yang sangat besar, dan tingkat kekerasan internal yang tinggi berhubungan langsung

dengan kegagalan dan kecenderungan untuk gagal. Namun, kekerasan saja tidak menjamin kegagalan, dan ketiadaan kekerasan tidak selalu berarti bahwa negara yang bersangkutan tidak gagal.

Selain indikator suatu negara mengalami *Failed State* juga dapat dilihat dari beberapa penyebab yakni seperti hilangnya legitimasinya dan kepercayaan atas pemerintahan suatu negara sehingga kelompok atau penguasa pada suatu negara mencari kontrol kekuasaan di dalam satu atau beberapa bagian dari wilayah nasional atau bahkan melintasi batas-batas internasional. Ketika kapasitas negara untuk mengamankan negaranya sendiri atau untuk bekerja dengan cara yang diharapkan menurun dan kapasitas yang tersisa hampir secara eksklusif dikhususkan untuk kepentingan segelintir orang atau etnis atau komunitas tertentu yang berkuasa, maka akan ada harapan dan kepercayaan yang lebih kecil pada negara dari pihak yang tersingkir dan kehilangan haknya. Para penguasa dianggap bekerja untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka bukan untuk negara maka legitimasi pemerintahan suatu negara akan merosot dan hilang (Rotberg, 2004).

Rotberg juga menjelaskan negara-negara lebih rentan terhadap kegagalan karena faktor ekonomi struktural seperti rendahnya tingkat aktivitas ekonomi, sebagian besar pemukiman di pedesaan, dan populasi penduduk yang rendah. Faktor tersebut kemudian dapat diperburuk ketika elit negara tidak mempunyai kepedulian terhadap pembangunan dan menerapkan manajemen ekonomi serta sistem politik yang hanya diperuntukkan pada tangan seorang pemimpin atau elit kecil yang memanfaatkan sumber daya negara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Dampaknya adalah melemahnya kapasitas negara serta menurunnya kemampuan negara dalam merespons berbagai permasalahan dan menurunnya tingkat PDB tahunan nasional dan per kapita.

Selain itu juga adanya tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi tumbuh subur di banyak negara, tetapi di negara-negara gagal, korupsi sering kali terjadi dalam skala yang sangat merusak. Korupsi kecil-kecilan yang meluas merupakan hal yang biasa, tetapi tingkat korupsi besar yang semakin meningkat menandai negara-negara gagal, suap untuk segala hal yang bisa dimenangkan dalam tender palsu seperti uplai medis, buku pelajaran, jembatan, jalan raya, dan konsesi pariwisata. Proyek-proyek konstruksi yang tidak perlu dan tidak efisien yang diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka hasilkan untuk mereka sendiri. Perizinan untuk kegiatan yang sudah ada maupun yang belum ada, serta pemerasan yang terus menerus dan menyeluruh. Dalam situasi seperti itu, para elit penguasa yang korup sebagian besar menginvestasikan keuntungan mereka di luar negeri, bukan di dalam negeri, sehingga membuat kegagalan ekonomi negara mereka menjadi lebih parah. Para perwira

militer selalu mendapatkan keuntungan dari rezim-rezim yang sangat korup ini dan menyerap dengan rakus dari sumber-sumber haram yang sama dengan para pejabat sipil. (Rotberg, 2004).

Ketika suatu negara yang mengalami *Failed State* tidak segera melakukan perbaikan atau perubahan kebijakan yang membuat negara tersebut lebih baik dari segala bidang negara tersebut akan mengalami *Collapsed State*. Seperti yang terjadi di Somalia ketika gagal pada akhir 1980-an, negara ini segera runtuh. Bosnia, Lebanon, dan Afghanistan juga mengalami keruntuhan akibat dari *collapsed state*, dan Nigeria dan Sierra Leone runtuh pada tahun 1990-an. Karena tidak sah dan tidak diakui para panglima perang dapat mengambil alih kekuasaan sebuah negara *collapsed state*, seperti Somaliland yang tidak diakui secara internasional di bagian utara Somalia yang lama. Meskipun negara yang runtuh telah terbagi-bagi menjadi wilayah kekuasaan para panglima perang, masih terdapat impas dari kekacauan, perilaku anomali, dan mentalitas anarkis serta usaha-usaha wirausaha-terutama perdagangan senjata dan narkoba-yang sesuai dengan jaringan teror eksternal (Rotberg, 2004).

Berpacu pada teori *failed state* ini dapat dilihat bahwa suatu negara dapat dikatakan gagal dengan melihat beberapa indikator dan penyebab yang membuat suatu negara termasuk kedalam status negara gagal/*failed states*. Awalnya tujuan dibentuknya suatu negara terbagi menjadi 2 tujuan yaitu *das sollen* atau tujuan yang diharapkan dan juga tujuan dan *das sein* atau kenyataan yang ada yang sekarang terjadi. Pada kasus *failed states* fungsi negara lebih pada fungsi *das sein*. Pada masa Romawi terdapat istilah *Solus Populi Suprana Lex* yang artinya bahwa kepentingan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Di sini dikatakan bahwa fungsi negara adalah untuk menyelenggarakan langkah-langkah itu. Namun pada teori ini negara menjadi *Failed states* ketika suatu negara tidak dapat menjalankan tujuan tersebut.

Teori *failed states* digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi di Sri Lanka. Teori *Failed states* digunakan untuk melihat Sri Lanka sebagai negara gagal sehingga menyebabkan kekacauan di negaranya. Dalam menjalankan tugas serta fungsinya suatu negara diperlukan otoritas pemerintahan untuk menjadi negara yang ideal. Keberhasilan otoritas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya ini pada akhirnya akan menentukan sebuah negara apakah negara tersebut berhasil dan dikatakan sebagai negara yang ideal. Atau justru mengalami kegagalan yang mengakibatkan *failed states*. Pendekatan teori *failed states* digunakan untuk mengetahui suatu negara masuk dalam status *failed states* dan setiap bagian yang termuat menjelaskan mengenai penyebab *failed states*. Dalam teori ini kita melihat faktor -faktor yang menyebabkan Sri Lanka menjadi *failed states*. Dengan adanya teori ini diharapkan dapat menjawab dan menjelaskan pertanyaan penelitian.

1.4 Hipotesis

Jatuhnya Sri Lanka ke dalam status *failed states* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Defisit perekonomian
2. Tingginya tingkat korupsi di Sri Lanka
3. Hilangnya legitimasi pemerintah pada sektor ekonomi dan militer

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan Sri Lanka sebagai subjek yang diteliti. Pada tahap pengumpulan data, penulis dapat melakukan studi literatur dengan menggunakan jurnal-jurnal dan media yang tersedia yang terkait dengan indikator atau faktor yang membuat suatu negara masuk dalam status negara gagal/*failed state*.

Setelah itu untuk menganalisis data yang telah terkumpul menggunakan analisis isi. Dalam hal ini analisis tersebut guna menemukan apakah Sri Lanka masuk kedalam status negara gagal/*failed state*. Hal itu disebabkan oleh gagalnya pemerintah Sri Lanka dalam menjalankan fungsinya . beberapa hal tersebut diantaranya seperti kegagalan pemerintah dalam mengelola infrastruktur yang telah dibangun, gagalnya dalam membayar utang luar negeri China hingga membuat krisis ekonomi, dan tingkat korupsi yang tinggi oleh pemerintah Sri Lanka

1.6 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini agar tetap sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penenulis menganalisis tentang kegagalan pengelolaan negara oleh pemerintah Sri Lanka hingga menyebabkan status *Failed States* pada tahun 2022. Penulis memfokuskan batasan waktu pada tahun 2022 karena pada tahun tersebut Sri Lanka sedang mengalami kekacauan dan membuat Sri Lanka jatuh hingga menjadi negara gagal/*failed state*.

1.7 Sistematika Penulisan

Suatu penelitian harus ditulis secara sistematis, hal itu merupakan salah satu hal penting dan syarat mutlak pada kaidah penulisan yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu penulisan hasil sebuah penelitian akan terlihat baik apabila disajikan menggunakan cara yang sistematis.

Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan penelitian yang berbentuk skripsi ini, sebagai berikut :

BAB I : Bab I berisi tentang pendahuluan. Bab ini merupakan uraian dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Jangkauan Penelitian, Kerangka Dasar Pemikiran, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Hipotesa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisikan penjelasan mengenai indikator kegagalan negara dan kondisi secara umum yang terjadi selama krisis di Sri Lanka

BAB III : Berisikan hasil dari temuan dan analisis dari penelitian dan pembahasan mengenai gagalnya pemerintah Sri Lanka sehingga masuk dalam kategori *failed states* pada tahun 2022.

BAB IV : Berisikan kesimpulan yang membahas mengenai hal-hal penting yang ditemukan selama proses penelitian dan analisis kegalan pemerintah Sri Lanka Hingga jatuh dalam status *Failed States*